

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberlangsungan hidup serta perkembangan suatu instansi merupakan tujuan pokok yang ditargetkan oleh setiap entitas bisnis. Seluruh kegiatan yang dilakukan untuk merealisasikannya perlu didukung oleh sistem manajemen yang efektif dan profesional. Manajemen tidak hanya berperan dalam mewujudkan sasaran organisasi, namun juga memegang peran penting dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan beserta aktivitas yang mungkin saling bertentangan antara pemangku kepentingan (*stakeholder*). Manajemen juga bertujuan sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yang merupakan dua tolok ukur pokok untuk mengevaluasi kinerja manajerial. Supaya seluruh tujuan tersebut dapat diwujudkan dengan optimal, seorang manajer diharapkan memiliki keterampilan dalam menganalisis serta memanfaatkan informasi akuntansi secara tepat (Febriyanti, 2020).

Penerimaan negara Indonesia secara umum terdiri atas dua komponen utama, yaitu pendapatan dalam negeri dan pendapatan yang bersumber dari hibah. Dari kedua sumber tersebut, penerimaan dalam negeri merupakan kontributor terbesar. Komponen ini terbagi menjadi dua jenis, yakni penerimaan dari sektor perpajakan dan dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan perpajakan mencakup berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cukai, serta pajak atas kegiatan perdagangan internasional, termasuk bea masuk dan bea keluar. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berasal dari pengelolaan sumber daya alam, antara lain minyak dan gas bumi (migas), pertambangan, serta sektor kehutanan, dividen BUMN, pelayanan publik, lelang aset negara, serta denda dan pungutan lainnya. Di sisi lain, penerimaan hibah berasal dari bantuan luar negeri baik berupa uang, barang, maupun jasa, meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan negara relatif kecil. Keseluruhan penerimaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara Indonesia yang berperan dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Berbeda dengan penerimaan dari sektor pajak, PNBP mencakup pendapatan negara yang diperoleh dari sumber daya alam, layanan pemerintahan, denda, serta penerimaan lainnya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki posisi strategis sebagai pelengkap penerimaan pajak dalam menjaga keseimbangan fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah menjadi komponen penting dalam struktur pendapatan negara Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pada tahun 2023, PNBP menyumbang sekitar 20% dari total pendapatan negara, meningkat dibandingkan rata-rata kontribusi sekitar 15% pada satu dekade sebelumnya. Lonjakan ini menunjukkan peningkatan ketergantungan fiskal negara terhadap sektor-sektor non-pajak. Di tengah tantangan ketidakpastian global, seperti krisis energi dan perlambatan ekonomi, diversifikasi sumber penerimaan negara menjadi sangat vital. Dalam konteks ini, penguatan basis PNBP menjadi langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan fiskal nasional tanpa terlalu membebani sektor pajak.

Salah satu instansi yang berperan strategis dalam pengelolaan PNBP adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), khususnya melalui unit operasionalnya, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Secara khusus, KPKNL Yogyakarta merupakan salah satu dari 70 KPKNL yang aktif di Indonesia dan memiliki cakupan kerja strategis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. KPKNL berkontribusi terhadap PNBP melalui berbagai layanan seperti lelang, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Di KPKNL Yogyakarta, layanan tersebut dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2018 dan PP Nomor 62 Tahun 2020 sebagai perubahannya, serta PMK No. 95/PMK.06/2022 yang secara khusus mengatur bea lelang. Misalnya, bea lelang untuk Pejabat Lelang Kelas II adalah 1% dari harga terjual

untuk penjual dan 1% untuk pembeli, yang menjadi komponen penting PNBPN. Tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Penelitian ini dengan menyajikan analisis kuantitatif terkait efektivitas dan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. Analisis dilakukan berdasarkan data target dan realisasi PNBPN selama lima tahun terakhir. Fokus utama adalah pada efektivitas pelaksanaan bea lelang dan pemanfaatan BMN sebagai dua komponen utama PNBPN. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini akan mengukur tingkat efektivitas berdasarkan rasio realisasi terhadap target, serta mengevaluasi kontribusi relatif terhadap pendapatan negara secara regional. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta adalah salah satu penerimaan negara. Sehingga pengelolaan penerimaan negara perlu dilakukan secara optimal agar capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini ke dalam penelitian dengan judul **“Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta”**. Sebagai upaya untuk memberikan kontribusi ilmiah terhadap penguatan kebijakan fiskal melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan negara non-pajak.

B. Cakupan Pembahasan Tugas Akhir

Laporan ini akan membahas mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan negara bukan pajak pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Yogyakarta. Data yang digunakan dalam pengkajian ini adalah Laporan Capaian Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta pada periode 2020 s.d. 2024. Efektivitas dan kontribusi suatu perusahaan dapat dinilai melalui hasil perhitungan berbagai macam metode

analisis data keuangan. Rasio yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Rasio Efektivitas Perusahaan pada periode 2020 sampai dengan 2024.
2. Rasio Kontribusi Perusahaan pada periode 2020 sampai dengan 2024.

Dari hasil analisis di atas, akan dapat diketahui bagaimana efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) suatu perusahaan selama periode 2020 sampai dengan 2024. Selain itu, juga akan diperoleh informasi mengenai seberapa besar kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.

C. Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sejauh mana tingkat efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta selama periode 2020 hingga 2024.
2. Untuk menilai kontribusi masing-masing jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta terhadap total penerimaan negara dari tahun 2020 hingga 2024.

D. Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Penulisan tugas akhir ini diharapkan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dan mendorong peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai isu-isu tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan pembanding bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai pengelolaan PNBP, baik di tingkat regional maupun nasional.

2. Manfaat Sosial

- a. Bagi penulis, pelaksanaan penelitian ini menjadi sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait pengelolaan keuangan negara, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis data dan menyusun karya ilmiah.
- b. Bagi instansi yang diteliti, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif serta menjadi sumber informasi yang berguna, khususnya bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam pengelolaan kekayaan negara.
- c. Bagi para pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pemahaman, khususnya bagi pembaca yang ingin mendalami informasi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.